



LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

**SKIPM
Padang**

KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 mengamanatkan setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dan menyajikan laporan kinerja (LKj) Tahun 2025 atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan Kinerja (LKj) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Padang mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan.

LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder dan sebagai sarana akuntabilitas yang merinci pertanggungjawaban organisasi dan pemakaian sumber daya untuk menjalankan misi organisasi. Disamping itu, diuraikan juga informasi terkait sasaran strategis dan indikator keberhasilannya dalam rangka pencapaian visi dan misinya.

Akhirnya kami berharap agar laporan kinerja ini dapat bermanfaat serta dapat dijadikan bahan masukan untuk peningkatan kinerja organisasi Stasiun KIPM Padang.

Padang, 12 Januari 2026

Plt. Kepala,



Ira Susanti, S.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF	v
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Profil Organisasi	2
1.3. Sistematika Penyajian	4
 BAB II. PERENCANAAN KINERJA	 5
2.1. Visi dan Misi	5
2.2. Tujuan	6
2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja	6
2.4. Pengukuran Kinerja	9
 BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	 11
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	11
3.1.1. Capaian Kinerja dibanding Target Tahunan	11
3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 5 Tahun Terakhir	54
3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Renstra	56
3.1.4. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja	57
3.1.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	59
3.1.6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Capaian Kinerja	62
3.2. Realisasi Anggaran	63

BAB IV. P E N U T U P	64
4.1. Kesimpulan	64
4.2. Rekomendasi	64
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Padang Tahun 2025 ...	8
Tabel 3.1.	Capaian Kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2025	12
Tabel 3.2.	Capaian Sasaran Kegiatan 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya	14
Tabel 3.3.	Data Unit Usaha yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Sektor Produksi Primer lingkup Stasiun KIPM Padang pada tahun 2025	16
Tabel 3.4.	Data UPI yang telah disertifikasi HACCP Tahun 2025	25
Tabel 3.5.	Data UPI yang telah disertifikasi SKP Tahun 2025	26
Tabel 3.6.	Rincian lokus dan jenis sampel kegiatan Inpres 01 Tahun 2025	29
Tabel 3.7.	Ekspor Hasil Perikanan Stasiun KIPM Padang Tahun 2025	33
Tabel 3.8.	Capaian Sasaran Kegiatan 2 berdasarkan Indikator Kinerjanya	35
Tabel 3.9.	Capaian Sasaran Kegiatan 3 berdasarkan Indikator Kinerjanya	39
Tabel 3.10.	Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan LK 2025 Lingkup KKP	42
Tabel 3.11.	Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP Semester II Tahun 2025	48
Tabel 3.12.	Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Stasiun KIPM Padang Tahun 2025	52
Tabel 3.13.	Perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2021 s/d 2025)	54
Tabel 3.14.	Perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang tahun 2025 dengan Renstra	56
Tabel 3.15.	Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025	60
Tabel 3.16.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil SKIPM Padang pada Tahun 2025	61
Tabel 3.17.	Realisasi Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun Anggaran 2025	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Struktur Organisasi Stasiun KIPM Padang	3
Gambar 2.1.	Peta Sasaran Strategis SKIPM Padang Tahun 2025	7
Gambar 3.1.	Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2025	11
Gambar 3.2.	Foto Dokumentasi Kegiatan Inspeksi CBIB dan CPIB Secara On Site	19
Gambar 3.3.	Foto Dokumentasi Kegiatan Inspeksi CBIB dan CPIB Secara Remote	20
Gambar 3.4.	Foto Dokumentasi Kegiatan Inspeksi CBIB Kapal	21
Gambar 3.5.	Foto dokumentasi kegiatan inspeksi HACCP Tahun 2025	27
Gambar 3.6.	Foto dokumentasi kegiatan inspeksi SKP Tahun 2025	27
Gambar 3.7.	Foto dokumentasi kegiatan Inpres 01 Tahun 2025 di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang	30
Gambar 3.8.	Foto dokumentasi kegiatan Inpres 01 Tahun 2025 di Mall Suzuya Stasiun Padang	31
Gambar 3.9.	Foto dokumentasi kegiatan penerbitan SMHKP Tahun 2025	34
Gambar 3.10.	Nilai IKPA Stasiun KIPM Padang Semester II Tahun 2025 pada Aplikasi OmSpan DJA – Kemenkeu	40
Gambar 3.11.	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 pada Aplikasi Monev Kemenkeu - Smart DJA	41
Gambar 3.12.	Indek IP ASN SKIPM Padang pada Aplikasi Simpeg Biro SDMA KKP	44
Gambar 3.13.	Hasil penilaian mandiri SAKIP Level II oleh Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025	45
Gambar 3.14.	Nilai rekomendasai hasil pengawasan Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 pada Aplikasi SIDAK	46
Gambar 3.15.	Nilai SKM Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 pada e-survey SKM BPPMHKP	53

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Padang selama Tahun 2025. Capaian kinerja (performance results) Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang pada akhir Tahun 2025 dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance agreement) pada awal Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja. Secara umum, Stasiun KIPM Padang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2025.

Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang telah menetapkan target kinerja Tahun 2025 dalam bentuk Kontrak Kinerja antara Kepala Stasiun KIPM Padang dengan Kepala BPPMHKP yang sejalan dengan Sasaran Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan. Target Kinerja Stasiun KIPM Padang yang terdiri dari 3 Sasaran Kegiatan (SK) dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Secara umum, Stasiun KIPM Padang telah berhasil melaksanakan misi dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mendukung pembangunan karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan selama Tahun 2025. Keberhasilan ini diukur berdasarkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK) dan indikator kinerja. Hal ini ditunjukkan dengan tercapainya target indikator kinerja kegiatan Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan 1 yaitu Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan :
 - a. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 70%, realisasi 100%, capaian 120%;

- b. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 70%, realisasi 100%, capaian 120%;
 - c. Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 1, realisasi 1, capaian 100%;
 - d. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 99%, realisasi 100%, capaian 101%;
- 2. Sasaran Kegiatan 2 yaitu Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar. IK untuk SK juga dapat tercapai dengan baik dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 75%, realisasi 83,33%, capaian 111%;
 - b. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 75%, realisasi 86,78%, capaian 115%.
- 3. Sasaran kegiatan 3 yaitu Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan. Capaian IK untuk SK ini adalah sebagai berikut:
 - a. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 92%, realisasi 95,86%, capaian 104%;
 - b. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 71,5%, realisasi 96,67%, capaian 120%;
 - c. Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 100%, realisasi 100%, capaian 100%;
 - d. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 82%, realisasi 84,27%, capaian 103%;
 - e. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Satker Stasiun KIPM Padang, target 86%, realisasi 87,6%, capaian 102%;

- f. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang target 85, realisasi 100, capaian 118%;
- g. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang target 76, realisasi 100, capaian 120%;
- h. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, target 70%, realisasi 80,86%, capaian 115%;
- i. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang target 3,36, realisasi 3,74, capaian 111%.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang Tahun 2025 dengan 3 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan dengan kategori capaian sasaran berhasil. Keberhasilan pencapaian tersebut diupayakan untuk semakin ditingkatkan, sedangkan untuk beberapa kegiatan yang belum terlaksana/terdapat permasalahan akan diupayakan untuk dapat diselesaikan.

Dengan disusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas Stasiun KIPM Padang dan menjadi umpan balik peningkatan kinerja Stasiun KIPM Padang pada periode berikutnya. Keberhasilan pelaksanaan dalam mendukung pengembangan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan merupakan hasil kerja keras dan kerjasama dari seluruh pegawai di lingkungan Stasiun KIPM Padang dengan semua pihak yang terkait guna mewujudkan harapan untuk mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan melalui peningkatan pemenuhan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Stasiun KIPM Padang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif, efisien dan terpercaya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Stasiun KIPM Padang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2025 untuk mencapai visi dan misi BPPMHKP. Di samping itu, juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap satuan kerja di lingkungan Stasiun KIPM Padang serta sarana untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Stasiun KIPM Padang.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Profil Organisasi

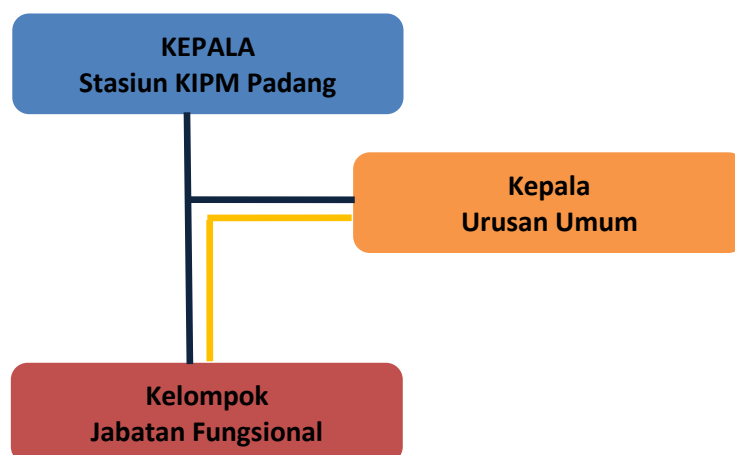
Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 90/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan, Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Padang yang selanjutnya disebut Stasiun KIPM Padang adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan dan mempunyai tugas yang sangat strategis, yaitu melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK) ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan, serta penerapan sistem manajemen mutu.

Stasiun KIPM Padang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan ke/di/keluar wilayah Negara Republik Indonesia, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan serta penerapan sistem manajemen mutu. Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Stasiun KIPM Padang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari Wilayah Negara Republik Indonesia;
2. Pelaksanaan pencegahan keluar dan tersebarnya HPI di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dipersyaratkan negara tujuan;
3. Pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan;
4. Pelaksanaan pemantauan HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;

5. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
6. Pelaksanaan inspeksi terhadap UPI dalam rangka sertifikasi penerapan program manajemen mutu terpadu;
7. Pelaksanaan surveilen HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
8. Pelaksanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan;
9. Pelaksanaan pengujian HPIK, mutu dan keamanan hasil perikanan;
10. Penerapan sistem jaminan mutu pada laboratorium dan pelayanan operasional;
11. Pembuatan koleksi media pembawa dan/atau HPIK;
12. Pengumpulan dan pengolahan data dan informasi perkarantinaan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan; dan
13. Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga dan tata usaha.

Dalam menjalankan tugasnya, pada awal tahun Tahun 2025 Stasiun KIPM Padang mempunyai pegawai atau sumber daya manusia sebanyak 13 (Tiga belas) orang pegawai baik teknis maupun administrasi yang cukup kompeten dan memadai. Bagan struktur organisasi Stasiun KIPM Padang dapat dilihat dalam Gambar 1.1 di bawah ini.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Stasiun KIPM Padang

1.3. Sistematika dan Penyajian

Sistematika dan isi laporan kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 merujuk pada aturan dan ketentuan yang berlaku Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi, sebagai berikut:

- a. **Ringkasan Eksekutif**, pada bagian ini menjelaskan gambaran secara ringkas tentang capaian kinerja selama Tahun 2025.
- b. **Bab I – Pendahuluan**, menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.
- c. **Bab II – Perencanaan Kinerja**, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja Tahun yang bersangkutan.
- d. **Bab III – Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
- e. **Bab IV – Penutup**, menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
- f. **Lampiran**, memuat Penetapan Kinerja Tahun 2025 dan hal-hal lainnya

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Visi dan Misi

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menetapkan misi, yakni ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”***. Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2025-2029, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

2.2. Tujuan

Tujuan pembangunan BKIPM merupakan penjabaran dari visi dan misi guna mendukung prioritas pembangunan kelautan dan perikanan. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029, telah menetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Stasiun KIPM Padang sebagai UPT BKIPM bertanggung jawab pada pencapaian 4 (empat) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu :

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan,serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia,ikan dan lingkungan
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standarisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan
3. Meningkatnya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan yang integratif, serta;
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik di Stasiun KIPM Padang.

2.3. Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada Tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis, sasaran dan indikator kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 ditunjukkan pada Gambar 2.1. di bawah ini :



Gambar 2.1. Peta Sasaran Strategis SKIPM Padang Tahun 2025

Peta strategis Stasiun KIPM Padang tersebut selanjutnya diturunkan ke dalam indikator dan target kinerja yang akan dicapai selama Tahun Anggaran 2025 baik dalam satu tahun sekaligus maupun setiap bulannya. Metode penjabaran peta strategis ke dalam indikator kinerja menggunakan metode cascading, dari eselon IV ke Kepala Urusan Umum dan Ketua Tim Kerja hingga seluruh pegawai Stasiun KIPM Padang. Dengan proses cascading tersebut maka strategi organisasi didukung oleh seluruh unit dan pegawai Stasiun KIPM Padang dalam setiap level. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Pencapaian indikator kinerja yang sudah ditetapkan adalah suatu bentuk keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis sebagaimana yang telah direncanakan. Target kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja dan targetnya, telah

dirinci ke dalam masing-masing perspektif sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja dan Target Kinerja SKIPM Padang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2025
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	82

	11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86
	12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85
	13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76
	14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
	15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	3,36

2.4. Pengukuran Kinerja

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) diperoleh melalui serangkaian penghitungan dengan menggunakan data target dan realisasi Indiaktor Kinerja (IK) yang tersedia. Dengan membandingkan antara data target dan realisasi IK, akan diperoleh indeks capaian IK. Penghitungan indeks capaian IK perlu memperhitungkan jenis polarisasi IK yang berlaku, yaitu maximize, minimize, dan stabilize. Ketentuan penetapan indeks capaian IK adalah:

1. Angka maksimum adalah 120;
2. Angka minimum adalah 0;
3. Formula penghitungan indeks capain IK untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

a) *Polarisasi Maximize*

Pada polarisasi maximize kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih tinggi dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \text{Realisasi/Target} \times 100\%$$

b) *Polarisasi Minimize*

Pada polarisasi minimize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang lebih kecil dari target, dengan formula :

$$\text{Indeks Capaian IK} = \{(1 + (1 - \text{Realisasi/Target})) \times 100\%$$

c) *Polarisasi Stabilize*

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian IK adalah realisasi yang berada dalam suatu rentang tertentu dibandingkan target.

4. Status indeks capaian IK adalah sebagai berikut

SANGAT KURANG	KURANG	CUKUP	BAIK	ISTIMEWA
≤ 50	50 – <70	70 – <90	90 – < 110	110 – 120

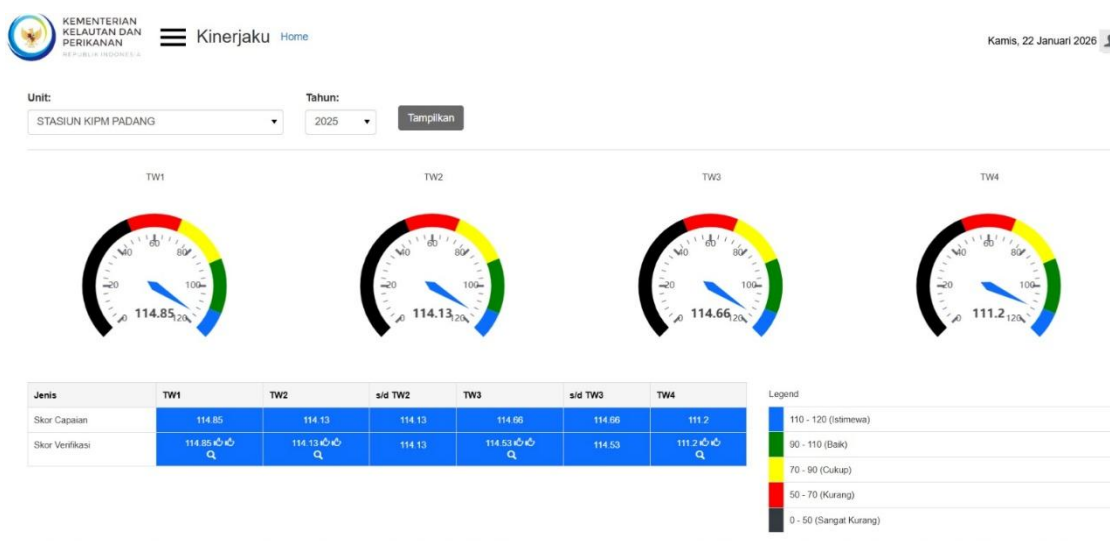
BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1. Realisasi Kinerja dibanding Target Tahunan

Secara umum, target-target kinerja pada Tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di www.kinerjaku.kkp.go.id, Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang sebesar 111,2% (kategori sangat baik).



Gambar 3.1. Dashboard Nilai Pencapaian Sasaran Strategis pada Aplikasi Kinerjaku KKP Tahun 2025

Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus

keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMKHP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 untuk setiap sasaran strategis dalam dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja KKP.

NPSS tersebut merupakan kompilasi nilai dari hasil pengukuran pencapaian indikator kinerja untuk setiap sasaran strategis organisasi. Pengukuran pencapaian indikator kinerja dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk kemudian dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya. Ringkasan capaian indikator kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 disajikan pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Stasiun KIPM Padang Tahun 2025

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		Target 2025	Realiasi 2025
SK 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	1.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100
		2.	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	100
SK 2	Terselenggaranya pengendalian sistem dan	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	83,33

	keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	86,73
SK 3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92	95,86
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5	96,67
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	82	84,7
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86	87,6
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85	100
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76	100
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	80,86
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	3,36	3,74

Sasaran Kegiatan 1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan

Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Padang. Nilai sasaran strategis ini pada Tahun 2025 adalah Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian 4 (empat) indikator kinerja yakni :

- 1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 2) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 3) Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%); dan
- 4) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%).

Tabel 3.2. Capaian Sasaran Kegiatan 1 berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Thd Target Tahunan
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	120
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	120
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1	1	100
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	100	101

IK1. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer

perikanan budidaya meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI),
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Adapun cara pengukuran capaian kinerja adalah :

$$\%X = \frac{A+B+C+D+E+F}{xn} \times 100\%$$

- %X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer
- A = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CBIB
- B = Persentase Unit menerapkan CPIB
- C = Persentase Unit Usaha yang menerapkan CPPIB
- D = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB
- E = Persentase Unit Usaha menerapkan CPOIB yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
- F = Persentase Unit Usaha menerapkan CPIB Kapal
- xn = Jumlah dari unsur pembentuk (6)*

Target Indikator Kinerja Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang Pada tahun 2025 adalah 70%. Perhitungan capaian berdasarkan persentasi realisasi dari 6 kegiatan sertifikasi (unsur pembentuk) di sektor Produksi Primer yang meliputi CBIB, CPIB, CPPIB, CPOIB, CDOIB dan CPIB di Kapal. Adapun perhitungan masing-masing dari unsur pembentuk adalah persentase antara sertifikat penerapan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Sektor Produksi Primer dibandingkan dengan kegiatan inspeksi yang dilaksanakan.

Adapun realisasi capaian dari masing-masing unsur pembentuk selama tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.3. Data Unit Usaha yang menerapkan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Sektor Produksi Primer lingkup Stasiun KIPM Padang pada tahun 2025

Standar Mutu dan Keamanan Pangan	Jumlah sertifikat yang diterbitkan (a)	Jumlah inspeksi yang dilakukan (b)	Persentase Unit Usaha yang menerapkan SMKP (a/b x 100%)
CBIB	14	14	100
CPIB	10	10	100
CPPIB	0	0	--
CPOIB	0	0	--
CDOIB	0	0	--
CPIB Kapal	8	8	100

Berdasarkan 3 (tiga) komponen pembentuk tersebut diatas maka capaian IK Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang dari target IKK pada tahun 2025 yang ditetapkan 70%, realisasinya 100%, dengan perhitungan :

$$\%X = \frac{A+B}{2} \times 100\%$$

$$\%X = \frac{100 + 100 + 100}{3} \times 100\%$$

$$\%X = 100\%$$

Adapun kegiatan sertifikasi CBIB dan CPIB dalam tahun 2025 adalah sebagai berikut :

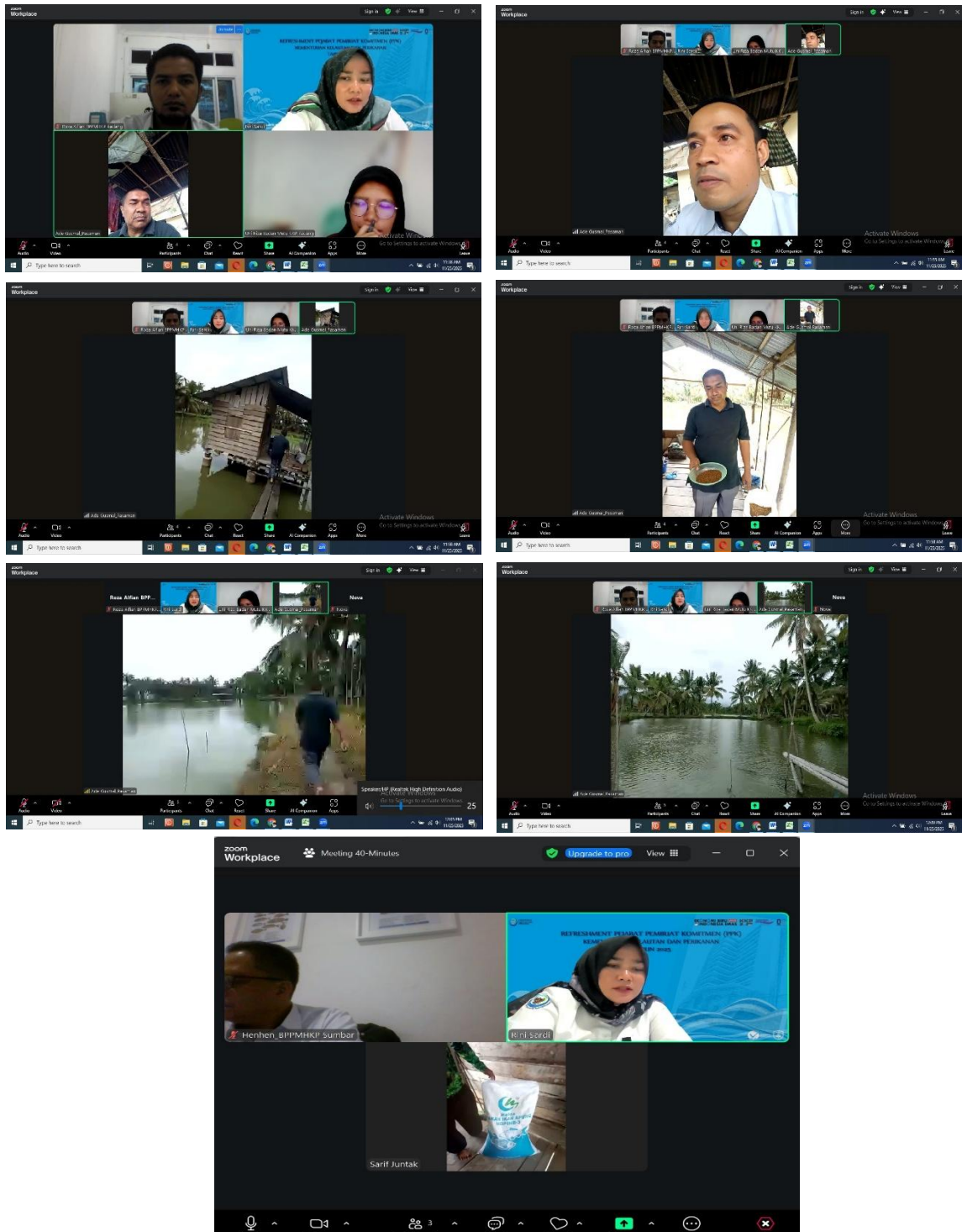
1. Pada tanggal 21 Juli 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB secara langsung (onsite) pada unit usaha pembenihan ikan sebagai berikut:
 - a. Herman Syarif, dengan jenis komoditi benih ikan nila;
 - b. Antoni Steven, dengan komoditi benih ikan lele;
 - c. Amrizal, dengan komoditi benih ikan nila.
2. Pada tanggal 22 Juli 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB secara langsung (onsite) pada unit usaha pembenihan ikan sebagai berikut:
 - a. Zarmayed, dengan jenis komoditi benih ikan lele;
 - b. Isranedi, dengan komoditi benih ikan nila.
3. Pada tanggal 10 September 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CBIB secara langsung (onsite) pada unit usaha pembesaran ikan sebagai berikut:
 - a. Taufik, dengan jenis komoditi ikan lele;
 - b. Fauzi, dengan jenis komoditi ikan mas;
 - c. Ismail, dengan jenis komoditi ikan mas.
4. Tanggal 30 September 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB secara langsung (onsite) pada unit usaha pembenihan ikan lele Syafri Hendri
5. Tanggal 16 Oktober 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB secara langsung (onsite) pada unit usaha pembenihan ikan lele ROHANI
6. Pada tanggal 4 November 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB di kapal penangkap ikan tuna Kevin Jaya 02
7. Pada tanggal 24 November 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CBIB secara online (*remote inspection*) pada unit usaha pembesaran ikan sebagai berikut:
 - a. Imran Efendi, dengan komoditi ikan mas;
 - b. Ali Hanafiah, dengan komoditi ikan mas;
 - c. Saripuddin Simanjuntak, dengan komoditi ikan mas;
 - d. Mahyudin, dengan komoditi ikan mas;

- e. Ali Amat Munthe, dengan komoditi ikan mas;
 - f. Mukti Ali, dengan komoditi ikan mas;
 - g. Sulaiman Siregar, dengan komoditi ikan mas.
8. Tanggal 25 November 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB unit usaha pembenihan ikan mas INDRA secara online
 9. Pada tanggal 04 Desember 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CBIB secara langsung (onsite) pada unit usaha pembesaran ikan sebagai berikut:
 - a. Hendra Syahputra, dengan komoditi ikan mas;
 - b. Meizal Wahyudi, dengan komoditi ikan mas;
 - c. Asril, dengan komoditi ikan mas;
 - d. Syamris, dengan komoditi ikan mas.
 10. Tanggal 05 Desember 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB secara langsung (onsite) pada unit usaha pembenihan ikan gurami Hesty Syamsir
 11. Tanggal 11 Desember 2025 Inspektur Mutu melakukan inspeksi CPIB secara online (*remote inspection*) pada unit usaha pembenihan ikan mas SYAMRIS

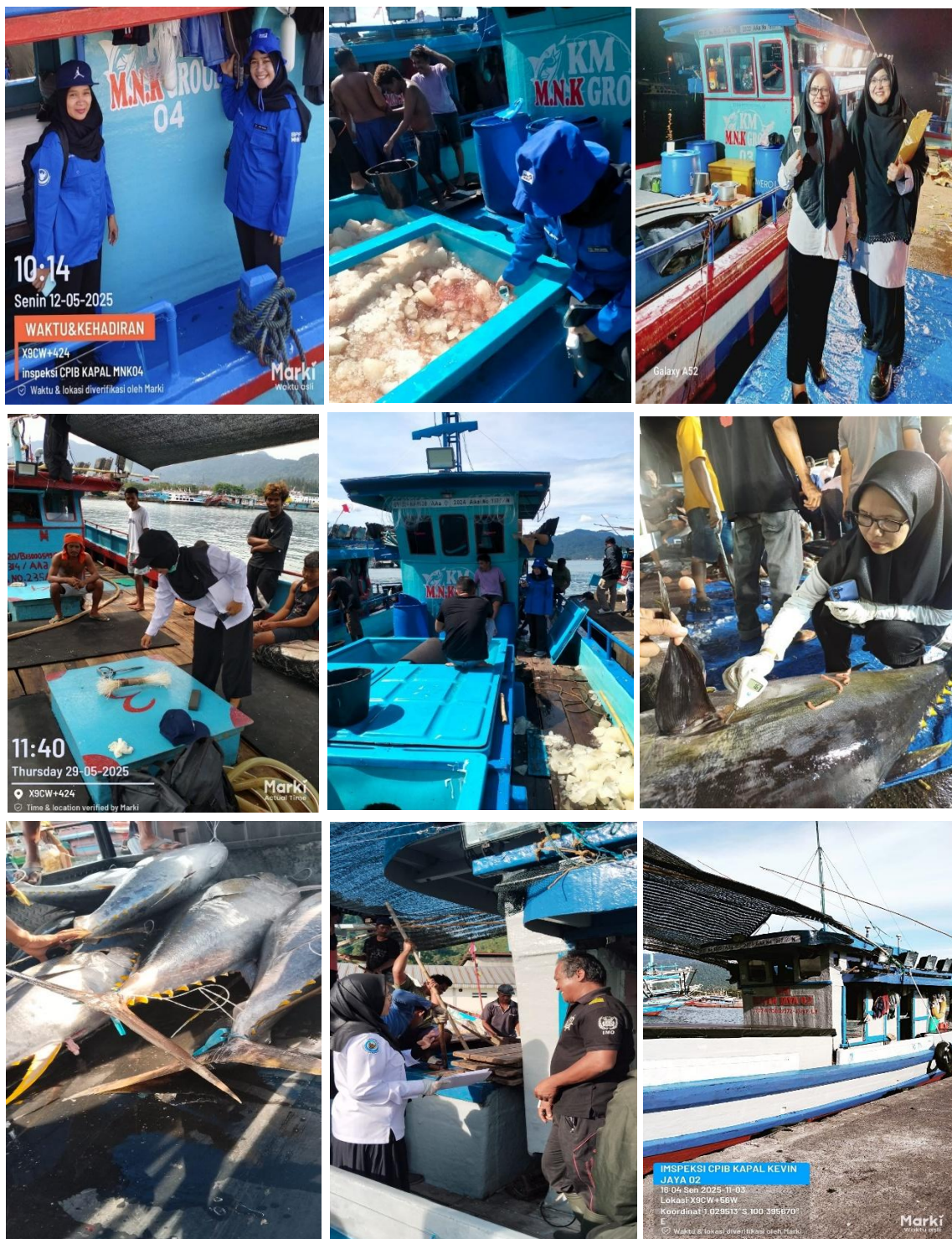




Gambar 3.2. Foto Dokumentasi Kegiatan Inspeksi CBIB dan CPIB Secara On Site



Gambar 3.3. Foto Dokumentasi Kegiatan Inspeksi CBIB dan CPIB Secara Remote



Gambar 3.4. Foto Dokumentasi Kegiatan Inspeksi CBIB Kapal

IK2. Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT lingkup Stasiun KIPM Padang

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Kewenangan Pembinaan dan Pengendalian Dalam Rangka Penerbitan Sertifikat Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, BBPMHKP mempunyai kewajiban untuk melakukan pengendalian atau sertifikasi terhadap kegiatan produksi primer sampai dengan pasca panen sedangkan Ditjen Teknis memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan. Dalam implementasinya, sertifikasi produksi pasca panen memerlukan dukungan dari pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan serta instansi terkait lainnya sebagai Pembina seperti Eselon 1 lingkup KKP dan DKP Provinsi/Kabupaten/Kota.

Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran

produk perikanan. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Serifikat Penerapan Manajemen Mutu Terpadu (PMMT)/*Hazard Analisis Critical Control Point* (HACCP) adalah sertifikat yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi syarat dan menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan pada kegiatan penanganan dan/atau pengolahan di UPI. Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP, diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah oleh UPI.

Permohonan penerbitan sertifikat HACCP dapat berupa :

1. Permohonan baru, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP bagi UPI/pelaku usaha baru yang belum memiliki sertifikat HACCP.
2. Permohonan perpanjangan, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP untuk perpanjangan sertifikat yang sudah habis masa berlakunya.
3. Permohonan penambahan ruang lingkup, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP bagi UPI yang akan menambah ruang lingkup produk
4. Permohonan peninjauan ulang, merupakan pengajuan sertifikasi HACCP bagi UPI yang mengalami penurunan peringkat sertifikat HACCP

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) adalah sertifikat yang diberikan kepada Pelaku Usaha terhadap setiap unit penanganan dan/atau pengolahan ikan yang telah menerapkan cara penanganan dan/atau pengolahan ikan yang baik dan memenuhi persyaratan prosedur operasi standar sanitasi.

Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan penanganan dan/atau pengolahan ikan di Unit Pengolahan Ikan (UPI). UPI yang dimaksud antara lain :

1. Unit penanganan dan pengolahan ikan;
2. Unit penanganan ikan hidup;
3. Unit penanganan rumput laut kering;
4. Gudang beku;
5. Gudang dingin;
6. Gudang kering, dan/atau
7. Miniplant

Pelaku usaha baik perorangan ataupun non perorangan yang mengajukan sertifikasi Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (*Online Single Submission*)/Sistem OSS dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

1. Sertifikat Pengolah Ikan (SPI) atau sertifikat keterampilan di bidang keamanan pangan yang setara untuk penanggung jawab mutu diterbitkan paling lama 5 tahun sebelum pengajuan permohonan SKP (dikecualikan bagi UPI skala mikro kecil).
2. Panduan Mutu penerapan Cara Pengolahan Ikan yang Baik dan Pemenuhan Persyaratan Prosedur Operasi Standar Sanitasi untuk setiap jenis ikan dan/atau jenis produk yang diolah (Bentuk & format sesuai Peraturan Menteri KP Nomor 17 Tahun 2019)
3. Rekomendasi kelayakan pengolahan dari Pembina Mutu di daerah.

Adapun cara pengukuran capaian kinerja adalah :

$$\%X = \frac{A+B}{xn} \times 100\%$$

%X = Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan
 A = Presentase Penerbitan Sertifikat Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk
 B = Persentase SKP yang diterbitkan di Unit Pengolahan Ikan skala UMKM dan menengah besar yang menerapkan GMPSSOP
 xn = Jumlah dari unsur pembentuk (2)*)

Jumlah SDM yang terlibat pada kegiatan Inspeksi/verifikasi SKP dan Inspeksi dalam rangka penerapan HACCP pada tahun 2025 sebanyak 5 orang yang merupakan Inspektur Mutu yang terdiri dari :

1. Inspektur mutu ahli muda 3 orang
2. Inspektur mutu ahli pertama 1 orang
3. Asisten inspektur mutu mahir 1 orang

Dukungan BPPMHKP terhadap program prioritas KKP adalah dalam rangka peningkatan produksi dan mutu perikanan serta nilai ekspor. BPPMHKP memastikan bahwa produk perikanan yang diekspor mempunyai jaminan mutu dan mampu bersaing dan diterima di pasar internasional.

Pada tahun 2025 dari target kinerja yang ditetapkan 70% realisasinya 100%, sehingga capainnya 120%. Hal ini berdasarkan pada realisasi penerbitan sertifikat HACCP 100% dan realisasi persentase SKP yang diterbitkan 100% dengan perhitungan ::

$$\%X = \frac{100 + 100}{2} \times 100\% = 100\%$$

Persentase penerbitan sertifikat HACCP adalah 100% sesuai dengan jumlah ruang lingkup inspeksi dimana pada Tahun 2025 ini ditargetkan 5 ruang lingkup inspeksi dan terealisasi 5 ruang lingkup HACCP, dengan rincian sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.4. Data UPI yang telah disertifikasi HACCP Tahun 2025

No	UPI	Ruang Lingkup	Jumlah RL inspeksi	Sertifikat HACCP
1.	CV Tor Mahseer Sumatera	Frozen Freshwater Fish	1	1
2.	PT Dempo Andalas Samudera	- Fresh Tuna - Frozen Tuna	2	2
3.	PT Lintas Laut Samudera	- Frozen Tuna - Fresh Tuna	2	2
Jumlah			5	5

Sementara Persentase penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan adalah **100 %**, sesuai dengan jumlah rekomendasi penerbitan SKP dari instansi pembina (Dinas Kelautan dan Perikanan) sebanyak 3 pelaku usaha dan telah dilakukan verifikasi/inspeksi dimana dinilai memenuhi syarat telah diterbitkan Sertifikat Kelayakan Pengolahan sebanyak 3 pelaku usaha

Tabel 3.5. Data UPI yang telah disertikasi SKP Tahun 2025

No	UPI	Ruang Lingkup	Rekomendasi Penerbitan SKP	Penerbitan SKP
1.	CV Tor Mahseer Sumatera	• Frozen Freshwater Fish • Keripik Ikan	2	2
2.	PT Lintas Laut Samudera	• Frozen Tuna • Fresh Tuna	2	2
3.	Rendang Ega	• Rendang Lokan • Rendang Tuna	2	2
4.	PT Dempo Andalas Samudera	• Pelagis beku • Demersal beku	2	2
5.	Usaha Baru Bils	Bakso Ikan	1	1
6.	Kinanti	Keripik ikan	1	1
7.	CV Mahakayo Minang Kreasi	Rendang tuna	1	1
Jumlah			11	11





Gambar 3.5. Foto dokumentasi kegiatan inspeksi HACCP Tahun 2025



Gambar 3.6. Foto dokumentasi kegiatan inspeksi SKP Tahun 2025

IK3. Lokasi pengawasan mutu hasil perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran *marine biotoxin* dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP.

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestik. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestik yang bebas dari cemaran *marine biotoxin* dan cemaran kimia berbahaya.

Adapun cara pengukurannya adalah :

$$\%X = \frac{A}{B} \times 100\%$$

%X = Persentase pengawasan mutu dan hasil perikanan di wilayah RI

A = Jumlah kab/kota /yang dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

B = Jumlah kab/kota/yang ditetapkan untuk dilakukan pengawasan mutu hasil KP di wilayah RI

Kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan domestik pada Stasiun KIPM Padang tahun 2025 dilakukan dua kali dalam setahun yaitu pada semester I dan

semester II di Kota Padang dengan lokus Pasar Lubuk Buaya, Pasar Modern Mall Suzuya Stasiun Padang.

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengawasan mutu hasil perikanan dilaksanakan, dilakukan Pembentukan Tim Daerah Pelaksana Kegiatan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Tim Inpres 01/2017) Tahun 2025 dengan melibatkan :

1. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumbar
2. Balai Besar POM Padang
3. Dinas Perikanan dan Pangan Kota Padang
4. Dinas Kesehatan Kota Padang
5. Satuan Pengawas Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Padang
6. Perguruan Tinggi (Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Bung Hatta)
7. UPTD Pasar Lubuk Buaya
8. Koordinator Penyuluh Perikanan Kota Padang.

Pada tahun 2025 ini target yang ditetapkan adalah 1 (satu) lokasi, dimana sesuai juknis kegiatan pengawasan/monitoring semester I (tahap I) harus dilaksanakan pada bulan Maret dan Semester II yang dilaksanakan bulan oktober 2025.

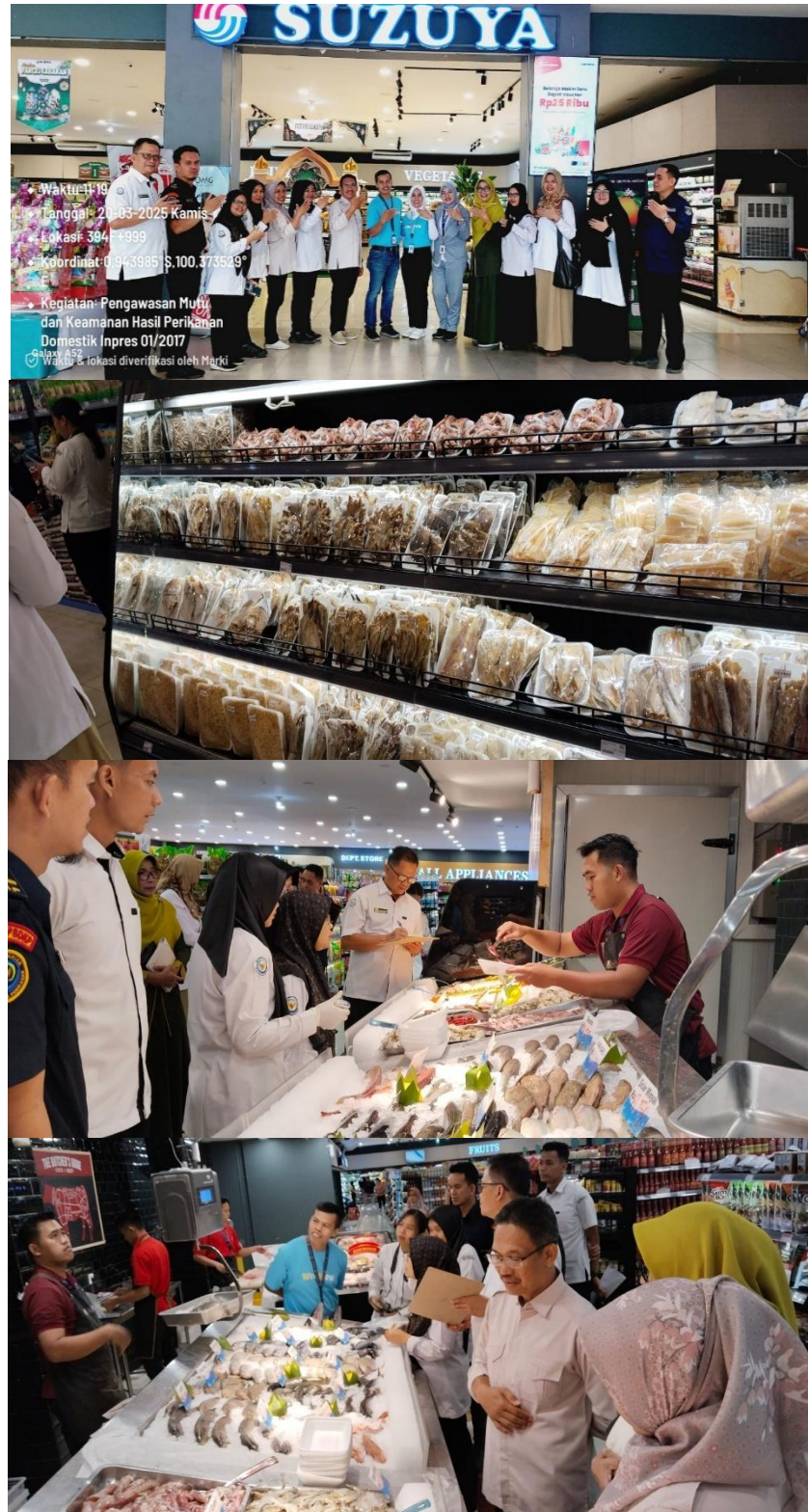
Pelaksanaan monitoring ke lapangan tahap I telah dilaksanakan tanggal 19-20 Maret 2025 dan tahap II pada tanggal 9-10 Oktober 2025. Dengan rincian lokus dan jenis sampel sebagai berikut:

Tabel 3.6. Rincian lokus dan jenis sampel kegiatan Inpres 01 Tahun 2025

No	Lokus	Jenis sampel
1	Pasar Lubuk Buaya	Ikan cakalang, Ikan kembung, ikan layang, ikan asin, cumi asin
2	Mall Suzuya Stasiun Padang	Ikan kembung, belut segar, dan ikan asin



Gambar 3.7. Foto dokumentasi kegiatan Inpres 01 Tahun 2025 di Pasar Lubuk Buaya Kota Padang



Gambar 3.8. Foto dokumentasi kegiatan Inpres 01 Tahun 2025 di Mall Suzuya Stasiun Padang

Dengan telah terlaksananya kegiatan pengawasan mutu dan hasil perikanan lingkup Stasiun KIPM Padang tahun 2025 dilaksanakan di satu kabupaten/kota, yaitu Kota Padang dari satu kabupaten/kota yang ditetapkan, maka realisasi IK ini adalah 1 dan capainnya 100%.

IK4. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan.

Cara pengukuran :

$$\%X = \frac{A + B}{A} \times 100\%$$

%X = Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor (%)

A = HC yang diterbitkan oleh BPPMHKP

B = Jumlah HC yang ditolak oleh negara tujuan *)

*) *Notifikasi Penolakan kasus/penolakan HC mutu dilampirkan*

Tabel 3.7. Ekspor Hasil Perikanan Stasiun KIPM Padang Tahun 2025

Bulan	Negara Tujuan	Frekwensi Ekspor (Jumlah HC terbit)	Jumlah HC yang ditolak
Januari	-	0	0
Februari	Jepang	1	0
Maret	Malaysia	2	0
	Amerika Serikat	4	0
April	Jepang	2	0
	Malaysia	1	0
Mei	Uni Emirat Arab	2	0
	Malaysia	1	0
	Jepang	1	0
Juni	Jepang	1	0
Juli	Jepang	1	0
	Malaysia	2	0
Agustus	Jepang	1	0
	Malaysia	1	0
September	Jepang	1	0
	Malaysia	2	0
Oktober	Malaysia	1	0
November	Jepang	2	0
Desember	Jepang	2	0
Jumlah		28	0

Capaian IK Rasio ekspor dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Padang, dihitung menggunakan rumus :

$$\%X = \frac{A + B}{A} \times 100\%$$

$$\% \text{ IKU} = \frac{28 - 0}{28} \times 100 = 100 \%$$



Gambar 3.9. Foto dokumentasi kegiatan penerbitan SMHKP Tahun 2025

Sasaran Kegiatan 2. Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar

Terselenggaranya pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar menjadi tolok ukur dari dampak keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh Stasiun KIPM Padang. Nilai sasaran strategis ini pada Tahun 2025 adalah Baik. Nilai ini diperoleh berdasarkan pencapaian indikator kinerja yakni:

1. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai); dan
2. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai).

Tabel 3.8. Capaian Sasaran Kegiatan 2 berdasarkan Indikator Kinerjanya

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Thd Target Tahunan
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	83,33	111
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	86,78	115

IK5. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan dinyatakan dalam bentuk nilai berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi

atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri.

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium *official control*. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 17025 yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

Cara pengukuran rata-rata nilai tingkat pemenuhan klausul dalam ISO 17025 yang terverifikasi :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke- 1, 2, 3, .., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada tahun 2025 ini ditargetkan 70% realisasinya 83,33%. Data tersebut didapatkan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu.

IK6. Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu Lembaga Inspeksi merupakan hasil penilaian dari evaluasi terhadap Lembaga Inspeksi dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17020:2012 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum;
2. Persyaratan Struktural;
3. Persyaratan Sumberdaya;
4. Persyaratan Proses;
5. Persyaratan Sistem Manajemen.

Cara pengukuran :

$$\bar{X} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

$\bar{X}$ = Rata rata

$x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n$ = Nilai tingkat pemenuhan ke- 1, 2, 3, .., n

n = banyaknya nilai tingkat pemenuhan

Pada tahun 2025 ini ditargetkan 70% realisasinya 86,78%. Data tersebut didapatkan dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Pusat Manajemen Mutu..

Sasaran Kegiatan 3. Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Capaian kinerja BKIPM pada *Learning and Growth Perspective* berasal dari sasaran kegiatan Tata kelola pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan dengan Indikator Kinerja:

- 1) Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai);
- 2) Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai);
- 3) Persentase penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 4) Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks);
- 5) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Satker Stasiun KIPM Padang (Nilai);
- 6) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 7) Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%);
- 8) Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Persen);
- 9) Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai).

Tabel 3.9. Capaian Sasaran Kegiatan 3 berdasarkan Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	% Thd Target Tahunan
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92	95,86	104
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5	96,67	120
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100	100
Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	82	84,27	103
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86	87,6	102
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85	100	117
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76	100	120
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	80,86	115
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	3,36	3,74	111

IK7. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga atas kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran dengan memperhatikan 8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Pengukuran capaian kinerja untuk IK Indikator IKPA UPT Stasiun KIPM Padang mengadopsi hasil penilaian yang ada pada **Aplikasi OmSpan** Direktorat

Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan. Kategori Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

- Sangat Baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- Kurang, apabila nilai IKPA < 70

Target IK Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) UPT Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 ditetapkan 92 dan pengukuran dilakukan pada Semester I dan Semester II. Berdasarkan data yang diperoleh dari Aplikasi OmSpan Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan, realisasi kinerja IK ini pada Semester II yang juga dijadikan dasar penilaian capaian akhir tahun adalah 95,86, sehingga capaian IK ini adalah 104%.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I PADANG

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir Nilai Total/(Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output				
1	010	032	567432	STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	Nilai	100.00	78.62	98.69	0.00	100.00	97.45	100.00	86.28	90%	0.00	95.86
					Bobot	10	15	20	0	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	11.79	19.74	0.00	10.00	9.75	25.00				
					Nilai Aspek	89.31		98.71				100.00				

Gambar 3.8. Nilai IKPA Stasiun KIPM Padang Semester II Tahun 2025 pada Aplikasi OmSpan DJA - Kemenkeu

IK8. Nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

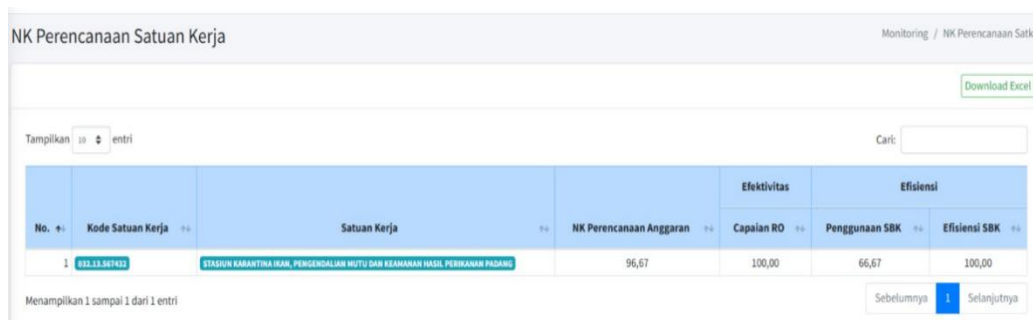
Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan

evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target akhir tahun anggaran 2025 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat kurang, apabila NKA ≤ 50

Cara mengukur capaian Indikator Kinerja pada IK ini adalah dengan mengambil data dari Aplikasi MONEV KEMENKEU pada Smart DJA. Target indikator kinerja Nilai kinerja pelaksanaan anggaran UPT Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2025 adalah 71,5 dimana pengukuran capaian dilakukan akhir tahun. Capaian IK ini berdasarkan data dari Aplikasi MONEV KEMENKEU pada Smart DJA adalah 96,67 yang berarti capaiannya 120.



NK Perencanaan Satuan Kerja				Monitoring / NK Perencanaan Satker		
				Download Excel		
Tampilkan 10 entri				Cari:		
No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	Efektivitas Capaian RO	Efisiensi Penggunaan SBK Efisiensi SBK	
1	002.13.007422	STASIUN KAWARTIRAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG	96,67	100,00	66,67	100,00

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya 1 Selanjutnya

Gambar 3.11. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 pada Aplikasi Monev Kemenkeu - Smart DJA

IK9. Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Temuan atas hasil audit pengelolaan keuangan dan laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. LHP BPK merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran pengelolaan keuangan dan kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas system pengendalian intern.

Pengukurannya :

$$\%X = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi BPK}} \times 100\%$$

Pada tahun 2025 target yang ditetapkan adalah 100%, dimana pada tahun 2025 pada Stasiun KIPM Padang tidak ada pemeriksaan BPK, sehingga realisasi IK ini pada adalah 100%.

Tabel 3.10. Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan LK 2025 Lingkup KKP

No.	Unit Kerja	Nilai Temuan Keuangan (Rp)	Nilai Realisasi Anggaran (Rp)	% (c/d)
a	b	c	d	e
1	Setjen	1.885.275.241,00	822.863.865.685,00	0,229
2	Ditjen PKRL	357.650.852,00	471.154.781.232,00	0,076
3	Ditjen PT	35.794.407,00	860.627.463.236,00	0,004
4	Ditjen PSDKP	50.381.000,00	995.498.070.995,00	0,005
5	Ditjen PB	368.007.712,00	992.008.206.671,00	0,037
6	BPPSDMKP	792.998.330,00	1.423.646.688.907,00	0,056
7	Ditjen PDSPKP	1.160.724.332,00	324.896.904.773,00	0,357
8	BPPMHKP	-	324.873.963.088,00	-
9	Itjen	-	84.427.641.894,00	-
	TOTAL	4.650.831.874,00	6.299.997.586.481,00	0,074



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ade Tajudin Sutiawarman

*) Bagi UPT yang tidak masuk dalam pemeriksaan BPK, maka capainnya 100%

IK10. Indeks profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Indeks Profesionalitas ASN diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 dimensi meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin.

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi: pendidikan S3, S2, S1, D3, D1, SLTA sederajat.
2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/ Diklat Teknis, Diklat 20 Jam (JP) satu tahun terakhir, seminar/Workshop/ konferensi/setara satu tahun terakhir.
3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi SKP dan Prilaku Kerja.
4. Disiplin diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin.

Formulasi menghitung capaian indikator Indeks kompetensi dan integritas BPPMHKP adalah:

$$\text{Indeks} = (25 \times A) + (25 \times B) + (25 \times C) + (25 \times D)$$

Keterangan

A : Persentase nilai pejabat yang mengikuti pelatihan

B : Persentase capaian output pegawai pada SKP

C : Persentase tingkat kehadiran pegawai

D : Persentase LHKPN/LHKASN

Untuk Satker Stasiun KIPM Padang ditetapkan target Tahun 2025 sebesar 82. Pengukuran dilakukan pada Semester I dan Semester I. Pengukuran capaian IK ini berdasarkan posisi akhir sehingga penilaian berdasarkan realisasi semester II yaitu berdasarkan data dari Biro SDMA indeks IP ASN 84,27, sehingga capaiannya 103%.

STASIUN KIPM PADANG	14	225	90 %	3177	79.42 %	25	83.33 %	5	100 %	84.27	TINGGI
STASIUN KIPM JAMBI	15	2233	89.32 %	3433	85.82 %	25	83.33 %	5	100 %	86.67	TINGGI

1 2 3 4 5

Gambar 3.12. Indek IP ASN SKIPM Padang pada Aplikasi Simpeg Biro SDMA-KKP

IK11. Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup satker UPT Stasiun KIPM Padang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah suatu kondisi dimana instansi pemerintah telah merubah orientasinya dari yang biasanya berorientasi kepada anggaran (input) atau kegiatan (output) semata menjadi berorientasi kepada hasil atau outcome.

Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II dihitung berdasarkan PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Level II merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di lingkungan BPPMHKP.

Cara Pengukurannya :

1. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Level II adalah nilai yang dikeluarkan dari hasil Inspektorat Mitra dari Unit Eselon I
2. Apabila penilaian tidak dilakukan oleh Inspektorat Mitra, maka nilai SAKIP Level II diperoleh melalui Penilaian Mandiri SAKIP oleh Sekretariat BPPMHKP.

Pada Tahun 2025 UPT Stasiun KIPM Padang memiliki target nilai SAKIP sebesar 86. Berdasarkan nilai hasil penilaian mandiri SAKIP Level II yang dikeluarkan oleh Inspektorat Mitra Stasiun KIPM Padang mendapatkan nilai 87,6 (A). Dengan demikian capaian IK ini adalah 102%.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
 JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
 TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
 LAMAN www.kkp.go.id SUREL set.bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 1/BPPMHKP.1/RC.610/II/2026 02 Januari 2026
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Hasil Penilaian Mandiri SAKIP TA 2025 UPT Lingkup BPPMHKP

Yth.

1. Kepala Pusat Manajemen Mutu, BPPMHKP;
2. Kepala Pusat Mutu Produksi Primer, BPPMHKP;
3. Kepala Pusat Mutu Pascapanen, BPPMHKP;
4. Kepala UPT lingkup BPPMHKP.

di
tempat

Dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja KKP sampai ke level satuan Kerja baik Pusat maupun Daerah Tahun 2024 berdasarkan Permen PAN RB 88 Tahun 2021 tentang

BKIPM SURABAYA II	27	27	12.6	21.25	87.85	A
SKIPM MEDAN II	27	26.4	11.85	22.5	87.75	A
SKIPM PADANG	27	25.5	12.6	22.5	87.6	A
SKIPM ENTEKONG	27	25.5	12.6	21.25	87.55	A

Gambar 3.13. Hasil penilaian mandiri SAKIP Level II oleh Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2025

IK12. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP kepada BPPMHKP berdasarkan LHP yang dihitung setiap triwulan yang dapat dilihat pada aplikasi SIDAK. Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT Stasiun KIPM Padang merupakan persentase perbandingan antara jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal

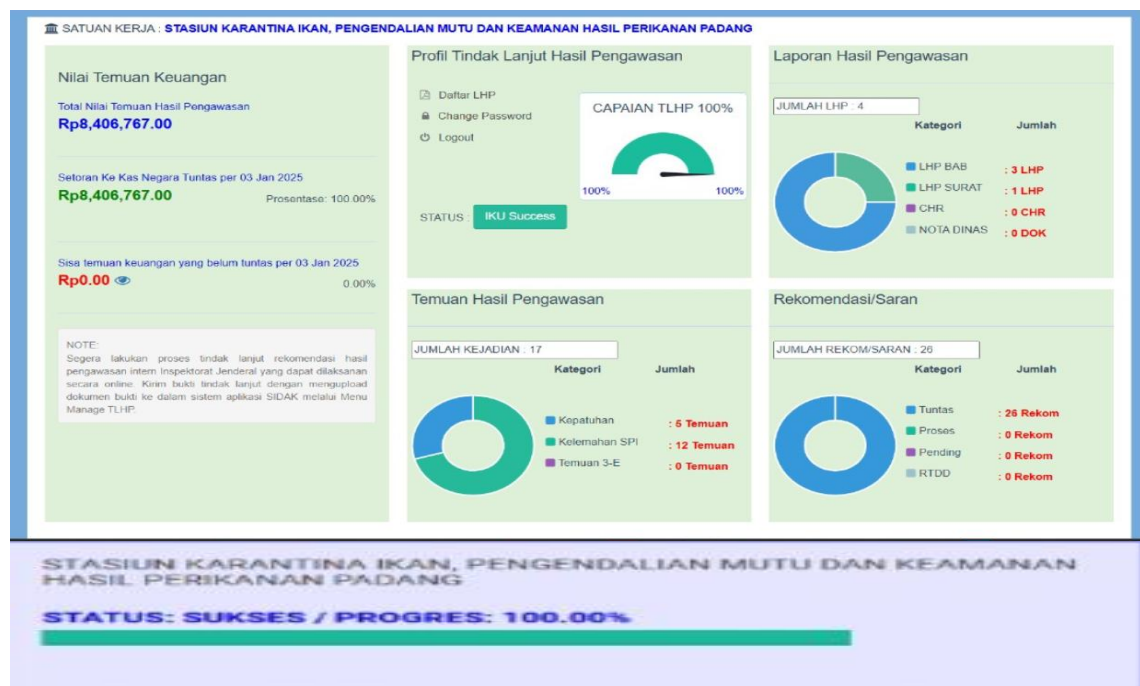
KKP dengan rekomendasi hasil pengawasan yang yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja UPT.

Penghitungan capaian :

$$\%X = \frac{\sum N_t}{\sum N} \times 100\%$$

- $\sum N_t$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti
- $\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan

Pada Tahun 2025 target yang ditetapkan adalah 85%. Berdasarkan data aplikasi SIDAK Stasiun KIPM Padang pada akhir tahun 2025 ini telah memanfaatkan seluruh rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP guna perbaikan kinerja UPT. Dengan demikian dari target 85% realisasinya 100% sehingga capaiannya 117%.



Gambar 3.14. Nilai rekomendasai hasil pengawasan Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 pada Aplikasi SIDAK

IK13. Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Rencana Umum Pengadaan (RUP) adalah instrumen penting dalam meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah yang dilaksanakan melalui proses pengadaan barang/jasa. Melalui RUP, pemerintah mengumumkan secara terbuka pemaketan pengadaan yang akan dilaksanakan oleh KKP. Pengukuran terhadap persentase RUP yang diumumkan pada SIRUP dapat merepresentasikan kualitas perencanaan PBJ di KKP. Nilai pada indikator ini didapatkan dari persentase nilai pengadaan barang/jasa yang diumumkan dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dibandingkan dengan nilai pagu pengadaan suatu unit kerja mandiri (Satuan Kerja). Pagu pengadaan merupakan pagu program dikurangi belanja pegawai dan pagu non pengadaan. Adapun ketentuan mengenai Persentase Rencana Umum Pengadaan dijabarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 11 Ayat (1). Penarikan data dilaksanakan setiap tanggal 1 pada Triwulan berikutnya.

Untuk menghitung persentase capaian rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang menggunakan rumus sebagai berikut

$$= \frac{\text{Nilai Rencana Umum PBJ yang diumumkan di SIRUP}}{\text{Pagu Pengadaan Barang dan Jasa}} \times 100$$

Jika RUP yang diumumkan unit kerja melebihi pagu pengadaan sehingga persentase akan bernilai lebih dari 100%, maka selisih persentase RUP yang diumumkan tersebut akan menjadi pengurang terhadap angka capaian indikator ini. Kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Sebelum operator menginput data barang dan jasa dalam aplikasi SIRUP terlebih dahulu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemegang akun KPA

- dan PPK
2. Menginventarisir kegiatan dan anggaran pada RKA-KL
 3. Mengupload ke dalam aplikasi SIRUP rencana umum pengadaan barang dan jasa lingkup UPT Stasiun KIPM padang

Pada Semester II ini BPPMHKP (eselon 1) mendapatkan nilai sebesar 100% dengan target 76 % sehingga capaian menjadi 120 % hal ini dapat dilihat pada aplikasi SIRUP pada Biro Umum dan PBJ serta Nota Dinas Nomor 41/SJ.7/TU.140/I/2026, Dimana data yang diambil berdasarkan nilai dari Eselon 1 BPPMHKP bukan data dari masing-masing UPT, hal ini dapat dilihat pada tabel sbb:

Tabel 3.11. Persentase rencana umum PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup BPPMHKP Semester II Tahun 2025

Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

NO	Nama, Satker	Paket RUP Terumukan			Statistik Moner				% RUP TERUMUKAN	
		Σ RUP PENYEDIA	Σ RUP SWAKELOLA	Σ RUP	Program 1 (Kode FD / EC / DL)	Program 2 (Kode HB)	Program 3 (Kode WA)	TOTAL PAGU PENGADAAN	Selisih Pagu Terumukan - Pagu Pengadaan	%
1	BALAI BESAR KIPM dan KHP MAKASSAR	3,242,871,000	-	3,242,871,000	181,118,000		3,061,753,000	3,242,871,000	0	100.00%
2	BALAI KIPM dan KHP BALIKPAPAN	1,323,545,000	-	1,323,545,000	202,275,000		1,121,270,000	1,323,545,000	0	100.00%
3	BALAI KIPM dan KHP LAMPUNG	945,341,324	-	945,341,324	9,638,000		935,703,324	945,341,324	0	100.00%
4	BALAI KIPM dan KHP AMBON	254,838,000	373,548,000	628,386,000	8,000,000		620,386,000	628,386,000	0	100.00%
5	BALAI KIPM dan KHP BANJARMASIN	1,490,331,000	-	1,490,331,000	182,390,000		1,307,941,000	1,490,331,000	0	100.00%
6	BALAI KIPM dan KHP DENPASAR	3,244,319,000	-	3,244,319,000	576,640,000		2,667,679,000	3,244,319,000	0	100.00%
7	BALAI KIPM dan KHP JAKARTA II	1,164,584,000	-	1,164,584,000	559,584,000		605,000,000	1,164,584,000	0	100.00%
8	BALAI KIPM dan KHP JAYAPURA	917,913,000	-	917,913,000	29,000,000		888,913,000	917,913,000	0	100.00%
9	BALAI KIPM dan KHP MANADO	2,969,998,000	-	2,969,998,000	266,630,000		2,703,368,000	2,969,998,000	0	100.00%
10	BALAI KIPM dan KHP MATARAM	1,082,514,000	-	1,082,514,000	96,044,000		986,470,000	1,082,514,000	0	100.00%
11	BALAI KIPM dan KHP MEDAN I	4,870,920,000	-	4,870,920,000	528,745,000		4,342,175,000	4,870,920,000	0	100.00%
12	BALAI KIPM dan KHP SEMARANG	1,787,939,000	-	1,787,939,000	143,680,000		1,644,259,000	1,787,939,000	0	100.00%
13	BALAI KIPM dan KHP SURABAYA I	7,981,344,000	-	7,981,344,000	606,896,000		7,374,448,000	7,981,344,000	0	100.00%
14	BALAI KIPM dan KHP TARAKAN	154,755,800	-	154,755,800	-		154,755,800	154,755,800	0	100.00%
15	BALAI UJI STANDAR KIPM dan KHP	5,422,320,000	-	5,422,320,000	2,221,352,000		3,200,968,000	5,422,320,000	0	100.00%
16	SEKRETARIAT BPPMHKP	42,257,224,000	-	42,257,224,000	34,136,701,000		8,120,523,000	42,257,224,000	0	100.00%
17	STASIUN KIPM dan KHP KENDARI	418,991,000	-	418,991,000	82,330,000		336,661,000	418,991,000	0	100.00%
18	STASIUN KIPM dan KHP MAMUJU	35,000,000	-	35,000,000	-		35,000,000	35,000,000	0	100.00%
19	STASIUN KIPM dan KHP SORONG	673,546,000	-	673,546,000	88,620,000		584,926,000	673,546,000	0	100.00%
20	STASIUN KIPM dan KHP ACEH	2,008,035,000	-	2,008,035,000	77,270,000		1,930,765,000	2,008,035,000	0	100.00%
21	STASIUN KIPM dan KHP BATAMI	1,351,261,698	-	1,351,261,698	1,874,000		1,349,387,698	1,351,261,698	0	100.00%
22	STASIUN KIPM dan KHP BENGKULU	436,771,000	-	436,771,000	24,978,000		411,793,000	436,771,000	0	100.00%
23	STASIUN KIPM dan KHP CIREBON	3,140,934,000	-	3,140,934,000	450,880,000		2,690,054,000	3,140,934,000	0	100.00%
24	STASIUN KIPM dan KHP GORONTALO	599,785,000	-	599,785,000	-		599,785,000	599,785,000	0	100.00%
25	STASIUN KIPM dan KHP JAMBI	190,000,000	-	190,000,000	73,000,000		117,000,000	190,000,000	0	100.00%
26	STASIUN KIPM dan KHP KUPANG	142,659,700	58,810,000	201,469,700	21,550,000		179,919,700	201,469,700	0	100.00%
27	STASIUN KIPM dan KHP MERAK	778,352,000	-	778,352,000	120,000,000		658,352,000	778,352,000	0	100.00%
28	STASIUN KIPM dan KHP MERALUKE	768,055,000	-	768,055,000	13,500,000		754,555,000	768,055,000	0	100.00%
29	STASIUN KIPM dan KHP PADANG	1,671,509,000	-	1,671,509,000	168,960,000		1,502,549,000	1,671,509,000	0	100.00%

IK14. Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diatas 75 pada Zona Integritas (ZI) yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya.

Nilai minimum untuk berpredikat WBK dicapai dengan evaluasi untuk memperoleh hasil nilai WBK ≥ 75 yang terdiri dari: **Nilai Pengungkit** yang diperoleh dari aspek Pemenuhan dan Reform (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik) dan **Nilai Hasil** yang diperoleh dari komponen birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Unit yang diarahkan berpredikat WBK diusulkan oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I dan mengacu kepada Permen KP Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembangunan dan Penetapan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penilaian yang dilakukan untuk mengukur tingkat komitmen dari implementasi pembangunan integritas di lingkungan Unit Eselon I di KKP dengan focus pada pembangunan Sistem Anti Korupsi yang mengacu pada Permen KP Nomor 49 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN Integritas di Lingkungan KKP.

Nilai Pembangunan Integritas Unit Eselon I diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal terhadap komponen system antikorupsi, yang meliputi :

- a. Pembangunan zona interitas (bobot 30%)
- b. Program pengendalian gratifikasi (bobot 15%)
- c. Penanganan pengaduan masyarakat dan WBS (bobot 15%)
- d. Penanganan benturan kepentingan (bobot 15%)
- e. Pelaporan Harta Kekayaan (LHKAN) (bobot 15%)

f. Pengendalian Kecurangan (bobot 10%)

Secara lebih rinci indikator penilaian pembangunan integritas unit Eselon I disajikan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE) yang disusun dan ditetapkan oleh Inspektorat Jenderal.

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Stasiun KIPM Padang yaitu :

1. Pembentukan dan Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas
Melakukan pembentukan Tim ZI melalui surat keputusan/surat tugas sebagai dasar pelaksanaan pembangunan ZI di lingkungan UPT.
2. Penyusunan dan Pemutakhiran Dokumen Pembangunan ZI
Menyusun dan melengkapi seluruh dokumen pembangunan ZI sesuai pedoman, meliputi:
 - Pakta Integritas
 - Komitmen Bersama
 - Rencana Kerja Pembangunan ZI
 - Dokumen pendukung lainnya
3. Penyusunan Rencana Aksi pada Enam Area Perubahan
Menyusun rencana aksi dan eviden pada enam area perubahan ZI, yaitu:
 1. Manajemen Perubahan
 2. Penataan Tatalaksana
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 5. Penguatan Pengawasan
 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
4. Pengumpulan dan Penataan Dokumen Eviden ZI
Melakukan pengumpulan, penataan, dan pengelompokan dokumen eviden ZI secara sistematis sesuai area perubahan dan indikator penilaian.

5. Digitalisasi dan Pengunggahan Dokumen ZI
Melakukan digitalisasi dan pengunggahan dokumen ZI ke media penyimpanan atau aplikasi yang ditetapkan guna memastikan kemudahan akses dan penilaian.
6. Koordinasi dan Konsultasi Pembangunan ZI
Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan unit pembina ZI/Inspektorat guna memastikan kelengkapan dan kesesuaian dokumen ZI dengan ketentuan.
7. Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Dokumen ZI
Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pemenuhan dokumen pembangunan ZI dan melakukan perbaikan jika ditemukan kekurangan.
8. Sosialisasi dan Internalisasi Pembangunan ZI
Melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pembangunan ZI dan peran masing-masing dalam pemenuhan dokumen dan eviden pendukung.

Pada tahun berjalan, Indikator Kinerja Utama (IKU) Zona Integritas ditetapkan dengan target sebesar **70%**. Berdasarkan hasil penilaian dan pemantauan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas, realisasi yang dicapai sebesar **80,86%**. Capaian ini menunjukkan bahwa target IKU telah **terlampau secara signifikan**, mencerminkan komitmen dan konsistensi unit kerja dalam menerapkan prinsip-prinsip reformasi birokrasi. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh penguatan manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, pengendalian internal yang efektif, serta implementasi berbagai inovasi dan tindak lanjut hasil evaluasi sebelumnya. Capaian ini menjadi dasar untuk terus meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas secara berkelanjutan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan prima.

Tabel 3.12. Lembar Kerja Evaluasi Zona Integritas Stasiun KIPM Padang Tahun 2025

LEMBAR KERJA EVALUASI ZONA INTEGRITAS							
WBK							
UNIT KERJA: BALAI/ STASIUN KIPM Padang							
Area Perubahan			Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai	Persentase
A. PENGUNGKIT			60,00				
	1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8,00	3,36	4,00	7,36	91,98%
	2.	PENATAAN TATALAKSANA	7,00	2,22	2,50	4,72	67,48%
	3.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	10,00	4,04	3,50	7,54	75,40%
	4.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10,00	4,73	4,31	9,03	90,30%
	5.	PENGUATAN PENGAWASAN	15,00	6,29	6,88	13,16	87,76%
	6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10,00	4,46	4,59	9,05	90,48%
TOTAL PENGUNGKIT						50,86	84,77%
B. HASIL			40,00				
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL			22,50			16,88	75,00%
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Anti Korupsi/ IPAK)	17,50			13,13	75,00%
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00			3,75	75,00%
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA			17,50			13,13	75,00%
	-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal : Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	17,50			13,13	75,00%
TOTAL HASIL						30,00	75,00%
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS						80,86	OK

IK15. Survey kepuasan masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang menggunakan elektronik SKM (e-survey SKM), masyarakat/ pengguna jasa untuk dapat menyatakan persepsi atas kepuasan layanan dapat mengakses Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat dengan alamat: <http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm/>. Aplikasi yang terdapat di web tersebut dapat di akses oleh kepada pengguna jasa. Daftar pertanyaan survey terdiri atas 9 unsur pertanyaan berupa Persyaratan; Sistem; Prosedur; Waktu Pelayanan; Biaya/Tarif; Produk Spesifikasi; Kompetensi Pelaksana; Perilaku Pelaksana; Penanganan Pengaduan; dan Sarana. Nilai indeks diperoleh dari nilai total rata-rata hasil kuisioner.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0.1111$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan, digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{IKM} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$$

Pada Triwulan IV Tahun 2025 nilai IKM Stasiun KIPM Padang adalah 3,74 dari target 3,36 yang ditetapkan, hal ini berarti capaian kinerja IK ini adalah 111%.



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMARAN www.kkp.go.id SUREL bppmhkp@kkp.go.id

Nomor : 98/BPPMHKP.1/HM.450/I/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 berkas
Hal : Penyampaian Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) BPPMHKP Triwulan IV Tahun 2025

12 Januari 2025

Yth. (Daftar Terlampir)
Di tempat

Sehubungan dengan berakhirnya periode Triwulan IV tahun 2025 telah dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pengguna jasa layanan UPP BPPMHKP dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan

Medan II																
33 Stasiun KIPM Padang	95,83	95,83	95,83	91,67	91,67	95,83	91,67	95,83	87,50	93,52	3,74	A	Sangat Baik	6	Online	

Gambar 3.15. Nilai SKM Stasiun KIPM Padang Triwulan II Tahun 2025 pada e-survey SKM BPPMHKP

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja 5 Tahun Terakhir

Tahun 2024 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari Rencana Strategis yang telah disusun oleh Stasiun KIPM Padang yaitu untuk periode Tahun 2021 sampai dengan tahun 2025. Selama kurun waktu 5 tahun ada beberapa indikator kinerja mengalami perubahan sejalan dengan perubahan kebijakan dari induk organisasi. Sebagaimana halnya pada tahun 2025 terjadi perubahan induk organisasi dari Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP). Perubahan tersebut menyebabkan adanya perubahan tugas dan fungsi pada UPT Stasiun KIPM Padang yang tentunya berdampak pada perubahan beberapa indikator kinerja.

Perubahan tersebut juga menyebabkan capaian indikator kinerja Tahun 2025 tidak semuanya dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun secara umum realisasi kinerja yang telah dicapai selama tahun 2025 pada beberapa indikator kinerja mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Adapun perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2020 s/d 2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.13. Perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang dalam 5 tahun terakhir (Tahun 2021 s/d 2025)

Indikator Kinerja	REALISASI				2025	
	2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	70	70	100
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	70	70	100

Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1	1	1	1	1	100
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100	100	99	99	100
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	--	70	75	83,33
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	--	70	75	86,78
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	98	98,3	97,85	93,76	92	96,86
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	--	--	71	71,5	96,67
Presentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	100	100	100	100
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	81,77	83,71	88,06	86	82	84,27
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	87,65	--	--	82	86	87,6
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100	100	80	85	100
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	76,21	78,26	80	76	100
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	--	--	--	75	70	80,86
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	--	3,65	3,81	3,36	3,36	3,74

3.1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Renstra

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelutan dan perikanan merupakan bagian dari suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan. Untuk lebih mengarahkan pembangunan BPPMHKP, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang telah menyusun Rencana Strategis Stasiun KIPM Padang tahun 2020–2024. Rencana Strategis Stasiun KIPM Padang tahun 2020 – 2024 ini diharapkan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian indikator kinerja kegiatan selama tahun 2024 telah sejalan dengan Rencana Strategis Stasiun KIPM Padang tahun 2020 – 2024, sebagai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14. Perbandingan realisasi kinerja Stasiun KIPM Padang tahun 2024 dengan Renstra

Indikator Kinerja	Tahun 2025		Renstra 2025-2029	
	Target	Realisasi	Target	Capaian %
Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	70	120

Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	100	70	120
Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1	100	1	100
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99	100	99	101
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	83,33	75	111
Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75	86,78	75	115
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92	96,86	92	104
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5	96,67	71,5	120
Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100	100	100	100
Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	82	84,27	82	103
Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86	87,6	86	102
Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85	100	85	117
Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76	100	76	120
Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70	80,86	70	115
Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	3,36	3,74	3,36	111

3.1.4. Analisa Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

Secara umum, target-target kinerja pada Tahun 2025 telah tercapai. Berdasarkan dashboard sistem aplikasi pengelolaan kinerja di



www.kinerjaku.kkp.go.id. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang sebesar 111,2% (kategori sangat baik). Nilai pencapaian sasaran strategis tersebut diperoleh dari pencapaian indikator kinerja pada setiap sasaran strategis berdasarkan target yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja selama satu tahun. Capaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sekaligus keberhasilan dalam melaksanakan target kinerja program karantina ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan BPPMKHP dalam mewujudkan visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Stasiun KIPM Padang Tahun 2025.

Faktor penyebab keberhasilan capaian kinerja untuk IK Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang mencapai 120% adalah karena kinerja dari Inspektur Mutu yang ada pada Stasiun KIPM Padang serta kegiatan Sosialisasi Sertifikasi Jaminan Mutu Hasil Perikanan. Keberhasilan ini juga karena adanya koordinasi yang baik antara Stasiun KIPM Padang dengan instansi terkait di Provinsi Sumatera Barat maupun ditingkat Kabupaten/Kota dan penyuluh perikanan.

Faktor penyebab keberhasilan IK Indeks kepuasan masyarakat layanan UPT Stasiun KIPM Padang mencapai target bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, tidak terlepas dari baiknya pelayanan yang diberikan kepada pengguna jasa oleh personil SKIPM Padang selama ini. Stasiun KIPM Padang dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa/masyarakat senantiasa mengacu kepada Keputusan Kepala BKIPM Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Publik Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Pada Sasaran Program 3 yaitu Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup UPT Stasiun KIPM Padang faktor penyebab keberhasilan capaian IK adalah adanya upaya dalam pemeliharaan dan meningkatkan kompetensi ASN melalui pendidikan/pelatihan/ bimtek/webinar dan lainnya yang dilaksanakan

secara daring maupun tatap muka langsung. Dengan meningkatnya kompetensi ASN diharapkan target Nilai Indek Profesionalisme ASN dapat tercapai, sekaligus juga penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan juga jauh lebih baik.

3.1.5. Analisa Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

A. Analisa efisiensi penggunaan anggaran

Pengukuran efisiensi pelaksanaan anggaran dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, efisiensi anggaran dipandang perlu untuk dilakukan dan dihitung dengan menggunakan formulasi sesuai PMK nomor 214 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengukuran dan Penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum(PAK_i \times CAK_i) - RAK_i}{\sum(PAK_i \times CAK_i)} \times 100\%$$

Keterangan :

E	=	Efisiensi
PAK _i	=	Pagu anggaran keluaran
RAK _i	=	Realisasi anggaran keluaran
CAK _i	=	Capaian keluaran

Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2025 total Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 4.353.749.000,- mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 4.100.391.998,- atau sebesar 94,18%, sementara capaian kinerja 111,2 (1,14). Dengan formulasi tersebut diperoleh angka efisiensi anggaran :

$$E = \frac{\sum(4.353.749.000 \times 1,14) - 4.100.391.998}{\sum(4.353.749.000 \times 114,15)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum(862.881.862)}{\sum(4.963.273.860)} \times 100\%$$

$$E = 17,39\%$$

Selanjutnya melakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)\%$$

$$NE = 50\% + 43,4\% = 93,40\%$$

Tabel 3.15. Perhitungan Efisiensi Penggunaan Anggaran Tahun 2025

Satuan Kerja	Realisasi Anggaran	Capaian Keluaran	Efisiensi (%)	Nilai Efisiensi	Katagori
Stasiun KIPM Padang	94,18	114,45	17,39	93,40	Sangat Efisien

B. Analisa efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Stasiun KIPM Padang membutuhkan SDM dengan latar belakang pendidikan yang mendukung dalam pelaksanaan kerja di bidang teknis dan administrasi. Berdasarkan data kepegawaian tahun 2025, kapasitas sumber daya manusia di lingkungan Stasiun KIPM Padang dapat terdiri dari 13 orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan 8 orang Tenaga Kontrak. Dari total 13 orang Pegawai Negeri Sipil (ASN) terdiri dari Pejabat Struktural dan Kelompok Jabatan Fungsional. Pada analisis efisiensi sumber daya manusia pada pencapaian kinerja Tahun 2025 terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok fungsional yang kini melaksanakan kegiatan dari perencanaan hingga pengawasan dan evaluasi, perlu didukung dengan ketersediaan SDM yang cukup dan berkualitas. Penambahan SDM khususnya Inspektur Mutu diperlukan, agar dapat mendukung tugas dan fungsi penyelenggaraan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tabel 3.16. Keadaan Pegawai Negeri Sipil SKIPM Padang pada Tahun 2025

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Plt. Kepala SKIPM Padang/ Kaur Umum	1
2	Inspektur Mutu Hasil Perikanan	5
3	Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan	1
4	Fungsional Umum	4
5	Pranata Komputer	1
6	P3K	1
	TOTAL JUMLAH	13

Pada laporan kinerja Tahun 2024 Stasiun KIPM Padang, dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja, ada beberapa analisis efisiensi penggunaan sumber daya lainnya internal dan eksternal, dengan cara:

1. Memaksimalkan peran serta Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Tenaga Kontrak yang ada melalui peningkatan kompetensi dan pengaturan pembagian tugas dan tanggung jawab;
2. Memaksimalkan peran serta instansi terkait khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup KKP yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Badan POM serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan;
3. Memaksimalkan peran serta perguruan tinggi, asosiasi-asosiasi usaha di bidang perikanan serta para pengguna jasa dalam ikut menunjang dan mensosialisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan.

3.1.6. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Stasiun KIPM Padang terdapat dua program yang merupakan cascading dari Unit Eselon I Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan. Program tersebut yaitu Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dan Program Dukungan Manajemen. Pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri terdapat dua kegiatan yaitu Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan serta Kegiatan Manajemen Mutu. Sementara pada Program Dukungan Manajemen terdapat satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Pada tahun 2025 ini berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja IK yang ada pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri maupun Program Dukungan Manajemen dapat mencapai target bahkan beberapa IKK capaiannya melebihi target (capaian IKK >100%). Keberhasilan capaian kinerja IKK pada Program Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri tidak terlepas dari Capaian kinerja IK pada Program Dukungan Manajemen, begitu juga sebaliknya.

Capaian IK pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri yang capainnya 120% yaitu IK 2 : Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Stasiun KIPM Padang, karena ditunjang oleh Program Dukungan Manajemen berupa pengelolaan dan penyediaan ASN yang professional, penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan anggaran yang baik. Begitu juga sebaliknya capaian IK pada Program Dukungan Manajemen sebagaimana terlihat pada IK 12: Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja UPT Stasiun KIPM Padang capaian 120, karena kegiatan pada Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri dilaksanakan dengan baik sesuai rencana aksi.

3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan kegiatan di Stasiun KIPM Padang Tahun 2025 tidak terlepas dari anggaran sebagai penggerak yang mendukung terselenggaranya kegiatan untuk melaksanakan kinerja yang telah disepakati dalam dokumen Perjanjian Kinerja Stasiun KIPM Padang. Secara keseluruhan pada tahun 2025 Stasiun KIPM Padang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 3.577.269.736, berdasarkan DIPA Nomor: SP DIPA-032.13.2.567432/2023 tanggal 30 November 2024. SP DIPA-032.13.2.567432/2024.

Stasiun KIPM Padang telah melaksanakan kegiatan pada Tahun 2025 sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dengan realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.17. Realisasi Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun Anggaran 2025

No	Sasaran Strategis	Pagu Anggaran (Rp)	Ralisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)
SK2.1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan	144.940.000	135.359.902	93,39
SK3.1	Terselenggaranya pengendalian sistem dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	50.760.000	32.061.405	63,16
SK4.1	Terselenggaranya Tatakelola pemerintahan yang baik lingkup Stasiun KIPM Padang	3.630.150.000	3.409.88.29	93,93
	TOTAL ANGGARAN	3.825.850.000	3.577.269.736	93,50%

Stasiun KIPM Padang pada Tahun 2025 mampu menyerap anggaran sebesar Rp. 3.577.269.736,- atau sebesar 93,50% dari total Anggaran Tahun 2025 sebesar Rp. 3.825.850.000,-.

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Pengukuran capaian kinerja di Stasiun KIPM Padang dilakukan terhadap 3 Sasaran Kegiatan dan 15 Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan. Secara umum, pencapaian target indikator Stasiun KIPM Padang telah sesuai dengan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja pada Tahun 2025 seluruh target telah tercapai dengan baik, bahkan ada beberapa IK capaiannya melebihi target. Namun demikian tetap diperlukan upaya dan dukungan, baik internal maupun eksternal untuk mendukung capaian kinerja tahunan.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan hasil penilaian capaian kinerja Tahun 2025, untuk penyusunan Indikator Kinerja tahun 2026 direkomendasikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Target Indikator Kinerja Tahun 2025 dapat dijadikan acuan untuk penetapan target Indikator Kinerja Tahun 2026 dan bila dimungkinkan ditingkatkan.
- b. IK Indeks profesionalitas ASN lingkup Stasiun KIPM Padang diukur secara semesteran. Namun untuk memastikan target dapat tercapai perlu dilakukan monitoring dan evaluasi setidaknya setiap tiga bulan dan dituangkan dalam Rencana Aksi 2026.
- c. IK Nilai minimal yang dipersyaratkan untuk pembangunan unit kerja berpredikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi UPT Stasiun KIPM Padang diukur pada akhir tahun. Untuk memastikan target dapat tercapai perlu dilakukan monitoring dan evaluasi setidaknya setiap tiga bulan dan dituangkan dalam Rencana Aksi 2026.



STASIUN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

LAMPIRAN



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Rini Sardi**
Jabatan : **Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Padang**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : **Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua

Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama

Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rini Sardi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU
DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN PADANG

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan Perikanan	1.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Primer yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		2.	Persentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan Lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		3.	Lokasi Pengawasan Mutu Hasil Perikanan sektor produksi pasca panen lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Lokasi)	1
		4.	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan memenuhi syarat mutu dan diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	99
SK.2	Terselenggaranya Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu laboratorium lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75
		6.	Nilai kualitas penerapan sistem manajemen mutu lembaga inspeksi lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	75
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, lincah dan akuntabel dalam bidang Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	7.	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	92
		8.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	71,5
		9.	Persentase Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	100
		10.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Indeks)	87
		11.	Penilaian Mandiri SAKIP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	86
		12.	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	85
		13.	Persentase rencana umum pengadaan PBJ yang diumumkan pada SIRUP lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	76
		14.	Persentase pemenuhan dokumen pembangunan zona integritas lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (%)	70
		15.	Survey Kepuasan Masyarakat lingkup UPT Stasiun KIPM Padang (Nilai)	88

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.065.232.000,-
2.	Manajemen Mutu	161.000,-
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	170.000,-
Total Anggaran Stasiun KIPM Padang Tahun 2025		4.396.232.000,-

Jakarta, 31 Januari 2025

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengendalian dan
Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan
Perikanan,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ishartini

Pihak Pertama
Plt. Kepala Stasiun Karantina Ikan,
Pengendalian Mutu dan Keamanan
Hasil Perikanan Padang,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Rini Sardi

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KEGIATAN PENDUKUNG	ANGGARAN/ PAGU (Rp)	SATUAN OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT/ KOMPONEN	TARGET OUTPUT BULANAN											
						JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Padang Pariaman, 6 Februari 2025

Kepala Susstun Karantina Ikan Pengendalian Mutu
 dan Keamanan Hasil Perikanan Padang,





SKIPM Padang



SKIPM Padang